



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2023

KEMENKO-EKON. Proyek Strategis Nasional.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR  
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
 MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
 PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK  
 STRATEGIS NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>A. Sektor Jalan dan Jembatan</b>		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
12.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
13.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
14.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
15.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
16.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
18.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
19.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
20.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
21.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
22.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
23.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
24.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
27.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
28.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
29.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
30.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
31.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
32.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
33.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
35.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)	Provinsi Jawa Timur
36.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur
37.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
38.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
39.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
40.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
42.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
44.	Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i> (termasuk Caringin - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
45.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
46.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
47.	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi	Provinsi Bali
48.	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)	Provinsi DKI Jakarta
<b>B. Sektor Pelabuhan</b>		
49.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
50.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
51.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
52.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
53.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
54.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
55.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
56.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
57.	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat
58.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
59.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
60.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
61.	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali <i>Maritime Tourism Hub</i> )	Provinsi Bali
62.	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i>	Provinsi Sumatera Selatan
63.	Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi	Provinsi Jambi
<b>C. Sektor Bandar Udara</b>		
64.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
65.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
66.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
67.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
68.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
69.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
70.	Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun	Provinsi Kepulauan Riau
<b>D. Sektor Kereta</b>		
71.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
72.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
73.	Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang (Target Penyelesaian Tahun 2024 hingga Pondok S5)	Provinsi Sumatera Utara
74.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
75.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
76.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
77.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
78.	Kereta Api Logistik Lahat - Kertapati	Provinsi Sumatera Selatan
79.	Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
80.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
81.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai	Provinsi DKI Jakarta
82.	Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
83.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta <i>East - West Phase I</i>	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat
<b>E. Sektor Kawasan</b>		
84.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
85.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
86.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
87.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
88.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
89.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
90.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
91.	Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
92.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
93.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
94.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
95.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
96.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
97.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
98.	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
99.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah
100.	Kawasan Industri Indonesia Konawe <i>Industrial Park</i> (IKIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara
101.	Kawasan Industri Tanjung Sauh	Provinsi Kepulauan Riau
102.	Kawasan Industri Indonesia Pomalaa <i>Industry Park</i>	Provinsi Sulawesi Tenggara
103.	Kawasan Industri Motui	Provinsi Sulawesi Tenggara
104.	Kawasan Industri Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
105.	Kawasan Industri Pulau Ladi	Provinsi Kepulauan Riau
106.	Kawasan Industri Pupuk Fakfak	Provinsi Papua Barat
107.	Kawasan Industri Indonesia Huabao <i>Industrial Park</i>	Provinsi Sulawesi Tengah
108.	Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing <i>Industry Park</i> (IDIP)	Provinsi Sulawesi Tengah
109.	Kawasan Industri Indonesia Huali <i>Industry Park</i> (IHIP)	Provinsi Sulawesi Selatan
110.	Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke	Provinsi Papua Selatan
<b>F. Sektor Perumahan</b>		
111.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
112.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
<b>G. Sektor Bendungan dan Irigasi</b>		
113.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
114.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
115.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
116.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
117.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
118.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
119.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
120.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan



NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
121.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
122.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
123.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
124.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
125.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
126.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
127.	Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
128.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
129.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
130.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
131.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
132.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
133.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
134.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
135.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
136.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
137.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
138.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
139.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
140.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
141.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
142.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
143.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
144.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
145.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
146.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
147.	Bendungan Napun Gete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
148.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
149.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
150.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
151.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
152.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
153.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat
154.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
155.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
156.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
157.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
158.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
159.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
160.	Bendungan Karangnongko	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
161.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
162.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
163.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
164.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
165.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
166.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
167.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
168.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komerling	Provinsi Sumatera Selatan
<b>H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi</b>		
169.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
170.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
171.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
172.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
173.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas	Provinsi Jawa Tengah
174.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
175.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
176.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
177.	Jakarta Sewerage System (JSS)	Provinsi DKI Jakarta
<b>I. Sektor Tanggul Pantai</b>		
178.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
<b>J. Sektor Energi</b>		
179.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
180.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i> )	Provinsi Kalimantan Timur
181.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
182.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
183.	Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan <i>Compresion (UCC Project)</i> di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
184.	Pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM)	Provinsi Papua Barat
185.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
186.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan (RDMP)</i>	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
187.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
188.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
189.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
190.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
191.	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
192.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau ( <i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
193.	Pengembangan <i>Biofuel</i> dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
194.	Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
195.	Gasifikasi Batubara di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
<b>K. Sektor Teknologi</b>		
196.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
197.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
198.	Pengembangan <i>Drone Male</i> Kombatan ( <i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i> )	Nasional
199.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
200.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
201.	Palapa Ring Integrasi	Nasional
<b>L. Sektor Pendidikan</b>		
202.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>M. Sektor Pariwisata</b>		
203.	Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu	Provinsi DKI Jakarta
<b>N. Sektor Perkebunan</b>		
204.	Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya	Provinsi Papua Barat

## II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);</li> <li>b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional;</li> <li>c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau; dan</li> <li>d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara.</li> </ol>
2.	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peremajaan Kebun Rakyat, dan Lahan Pertanian bagi Masyarakat Korban Konflik di Provinsi Aceh.
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara.
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	58 lokasi Exit tol pada 10 Provinsi.
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang.
6.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>	Program Pembangunan Smelter terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah;</li> <li>2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah;</li> <li>3) PT Artha Mining Industry di</li> </ol> </li> </ol>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>Bombana, Sulawesi Tenggara;</p> <p>4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara;</p> <p>5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;</p> <p>6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara;</p> <p>7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan</p> <p>8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara.</p> <p>b. Pembangunan 4 (empat) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh:</p> <p>1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat;</p> <p>2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat;</p> <p>3) PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat; dan</p> <p>4) PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga, Kepulauan Riau.</p> <p>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:</p> <p>1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan</p> <p>2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.</p> <p>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.</p> <p>e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan:</p> <p>1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.</p>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ <i>Food Estate</i>	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> .
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II.
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara	<p>Program terdiri dari:</p> <p>a. Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya;</p> <p>b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;</p> <p>c. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;</p> <p>d. Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan</p> <p>e. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
11.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
12.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.
13.	Program Pengembangan Kawasan <i>Eco-City</i>	Pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i> di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan <i>masterplan</i> .

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO